

Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang

Muhammad Reza Hudaya^{1*} dan Titis Puspita Dewi²

¹ Alumni Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada; ¹ mrezahdy@gmail.com

² Alumni Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; ² titis.dewi@arjunawijaya.com

* Correspondence

Received: 21/05/2021; Accepted: 21/06/2021; Published: 30/06/2021

Abstrak: Perubahan iklim yang terjadi secara global menjadi isu strategis Indonesia. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melaksanakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini dapat terselenggara melalui partisipasi dari masyarakat minimal setingkat Rukun Warga (RW) atau kampung yang memiliki peran untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. ProKlim ini telah mengimplementasikan proses kerja sama kolaboratif antar aktor pemerintah dan non pemerintah. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara. Data kemudian diolah dari tahap reduksi data, interpretasi temuan, dan diperiksa keabsahannya melalui triangulasi data. Berdasarkan temuan yang dianalisis menggunakan 6 (enam) kriteria *Collaborative Governance* dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Kelurahan Talangbubuk pada implementasi ProKlim dapat dikategorikan sebagai proses kolaborasi.

Abstract: Climate change that occurs globally is a strategic issue for Indonesia. One form of attention from the Government of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry is implementing the Climate Village Program (ProKlim).

This program can be implemented through the participation of the community at least at the level of Rukun Warga (RW) or a village that has a role in reducing the risk of climate change impacts. ProKlim has implemented a collaborative cooperation process between government and non-government actors. In general, the research objective is to describe the implementation of collaborative governance in the implementation of ProKlim in Talangbubuk Village which has received the Main Category ProKlim in 2020. This research uses descriptive qualitative methods through document study and interviews. The data is then processed from the data reduction stage, the interpretation of the findings, and the validity of which is checked through data triangulation. Based on the findings analyzed using 6 (six) Collaborative Governance criteria, it can be concluded that the collaboration between PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Government of Talangbubuk Village, the Palembang City Environment and Sanitation Service, and community of Talangbubuk Village in ProKlim implementation can be categorized as a process collaboration.

Kata Kunci: kolaborasi, non Pemerintah, pemerintah, proklm.

1. Pendahuluan

Pemanasan global merupakan salah satu masalah lingkungan yang masif terjadi saat ini. Hampir seluruh wilayah di dunia mengalami kondisi demikian dengan kenaikan suhu udara yang signifikan. Wilayah perkotaan dengan kondisi lingkungan yang minim tutupan vegetasi menyebabkan kenaikan suhu semakin terasa. Sugiarto, dkk (2018) menyatakan kenaikan suhu minimum dari tahun 1977 hingga 2017 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,5°C, peningkatan suhu udara rata-rata harian sebesar 1,3°C, dan peningkatan suhu udara maksimum sebesar 1,2°C. Perubahan tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat terlebih akibat cuaca yang tidak menentu. Selain itu, karena masyarakat menggantungkan hidupnya pada alam, seperti: petani, buruh tani, dan pekerja perkebunan mengakibatkan secara perlahan memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Dalam skema kebijakan publik, pemerintah sebagai aktor utama yang menangani perubahan iklim telah memiliki kebijakan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan tujuan menangani

perubahan iklim. Adapun kegiatan ProKlim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Pada ProKlim, terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur, seperti penguatan kelembagaan sosial masyarakat dan pengkayaan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, program ini tidak serta merta berjalan saat hanya dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2011 saat pertama kali diluncurkan hingga sekarang, muncul keterlibatan aktor lain, misalnya aktor privat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah lainnya yang turut andil dalam implementasi ProKlim.

Salah satu aktor privat yang turut serta dalam ProKlim adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju mendukung implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam implementasinya, ProKlim di lokasi tersebut dilakukan oleh beberapa *stakeholder* dari sektor publik, aktor privat, dan masyarakat. Proses implementasi kolaborasi antar *stakeholder* menjadi fokus menarik untuk diteliti. Seberapa jauh kerjasama dalam program ini dilakukan, siapa saja aktor yang terlibat dalam ProKlim ini diteliti dengan konsep *collaborative governance* sehingga dapat dikatakan sebagai program yang kolaboratif.

Collaborative governance merupakan salah satu tipe *governance*. Konsep ini menyatakan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerjasama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat (Ansell dan Gash, 2007). Konsep memberikan gambaran bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah selaku aktor publik dan organisasi bisnis selaku aktor privat tidak bekerja secara terpisah melainkan bekerja sama demi kepentingan masyarakat.

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan adanya 6 (enam) kriteria yang penting dalam *collaborative governance*, antara lain:

- a. Forum; dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
- b. Peserta forum termasuk pelaku non negara (lembaga privat).
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik.
- d. Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.

e. Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama atau konsensus.

f. Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.

Dalam melakukan proses kolaborasi terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Suatu tahapan model kolaborasi penting untuk dipandang sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Namun, sedikit berbeda dengan pendapat Goliday. Goliday (2010) menyatakan *collaborative governance* melibatkan pengelolaan hubungan untuk memanipulasi regulasi dan sistem, sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil. Menurutnya, *collaborative governance* berlaku seperti kemitraan yang dibuat khusus ketika aktor privat menggantikan peran sektor publik. Aspek kolaborasi pada dasarnya membentuk kesamaan tujuan antar aktor pada setiap tahapan kebijakan publik. Sedangkan kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari hingga April 2021 di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kelurahan Talangbubuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki perbedaan dengan lokasi lain terkait pelaksanaan ProKlim, khususnya yang dilaksanakan di Kota Palembang. Pada implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk telah mengkolaborasikan antar aktor dengan skema *collaborative governance*. Hal ini menarik karena proses kolaborasi yang dilakukan dapat menjadi model implementasi ProKlim di lokasi lain. Secara umum, penelitian berikut bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020.

Penelitian berikut menggunakan metode kualitatif sehingga mampu menggali implementatif. Secara bertahap penulis berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi (Patilima, 2005). Informan dalam penelitian, antara lain: tim *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju sebanyak 5 (lima) orang, penggerak masyarakat Talangbubuk sebanyak 3 (tiga) orang, Lurah Talangbubuk, Camat Plaju, serta Kasi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasanah (2016) menjelaskan bahwa observasi partisipan dilakukan dengan cara ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi untuk mengeksplorasi subyek. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang terlihat mata dan juga informasi yang tersembunyi di balik diri subyek penelitian (Subadi, 2006). Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim serta Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kampung Iklim, kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) menjadi perhatian banyak pihak. Program ini dapat terselenggara melalui partisipasi dari masyarakat minimal setingkat Rukun Warga (RW) atau kampung yang memiliki peran untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Tidak hanya menjadi upaya pengurangan dampak perubahan iklim yang terjadi secara global namun ProKlim turut menjadi penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Selain itu, ProKlim juga menjadi jembatan untuk munculnya *collaborative governance* dalam pengimplementasiannya.

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan mulai intensif dilaksanakan pada awal masa pandemi Covid-19, yaitu: bulan April 2020. Meski demikian, kegiatan yang sesuai aspek adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan dalam penilaian ProKlim telah dilaksanakan sejak lama. Secara masif masyarakat melakukan sejumlah upaya yang ternyata sejalan dengan penilaian ProKlim, khususnya untuk masuk dalam kategori utama. Hal ini turut terjadi pada ProKlim Kelurahan Talangbubuk dimana pada tahun pertama pengusulan telah berhasil memperoleh penghargaan ProKlim Kategori Utama. Keberhasilan tersebut tidak dapat tercapai tanpa kerja sama antar pihak.

Berdasarkan temuan pada studi dokumen dan wawancara, data kemudian diolah dari tahap reduksi data, interpretasi temuan, dan diperiksa keabsahannya melalui triangulasi data, proses *collaborative governance* pada ProKlim Talangbubuk

telah memenuhi 6 (enam) kriteria *collaborative governance*, antara lain dapat dilihat dalam Gambar di bawah:

1. Forum diprakarsai oleh lembaga publik
2. Peserta dalam forum termasuk aktor swasta
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik
4. Terorganisir
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus
6. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik

Gambar 1 enam kriteria *collaborative governance* (Ansell dan Gash, 2007).

Dengan penjelasan sebagai berikut dalam Tabel 1:

Tabel 1. Analisis Enam Kriteria *Collaborative Governance*

No.	Enam Kriteria <i>Collaborative Governance</i>	Implementasi Kriteria dalam ProKlim Kelurahan Talangbubuk
1.	Forum ini diprakarsai oleh lembaga publik.	Forum kelembagaan yang ada di Kelurahan Talangbubuk merupakan hasil prakarsa masyarakat, khususnya yang berada di RT 002 RW 001 Lorong Mari, RT 010 RW 003 Lorong Setia, dan Lorong Mulia I. Forum kelembagaan terwadahi dalam beberapa kelompok yang memiliki fokus bidang dan kekhasan dalam keahlian serta kompetensi. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan dan legalitas kelembagaan, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk mengeluarkan Surat Keterangan (SK) (contoh dalam Gambar 1 terkait pembentukan Struktur Satuan Tugas Covid-19 Ayam Jago) yang mendukung pelaksanaan mitigasi (misal) terhadap penyakit menular. Hasil prakarsa tersebut pun tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan kebijakan dan pendampingan secara intensif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sebagai representasi pemerintah yang ditunjuk langsung untuk implementasi ProKlim.

2. Peserta dalam forum termasuk aktor swasta.	Pada implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk, salah satu pihak swasta yang memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, peningkatan kapasitas, maupun pemberdayaan masyarakat adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. Tahun 2021, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju termasuk dalam forum pembinaan replikasi ProKlim di 10 (sepuluh) lokasi berpotensi ProKlim Kategori Utama untuk mendukung perolehan ProKlim Lestari oleh Kelurahan Talangbubuk (contoh dalam Gambar 2 terkait keterlibatan aktor swasta dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi masyarakat melalui pembuatan pupuk komposter). Implementasi Replikasi ProKlim Menuju ProKlim Lestari. Pelibatan aktor swasta (non pemerintah) ini dapat terselenggara dengan baik apabila sinergi dengan pemerintah baik Pemerintah Kelurahan Talangbubuk maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang pun berjalan serta memiliki visi bersama, yaitu: mewujudkan replikasi ProKlim menuju ProKlim Lestari.
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik.	Pada implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk, setiap peserta dalam forum memperoleh kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya, terutama untuk akselerasi perolehan ProKlim Lestari di tahun 2021.
4. Terorganisir.	Seluruh kegiatan dalam implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk memiliki struktur organisasi yang jelas, kegiatan yang terkontrol, dan dilaksanakannya monitoring serta evaluasi secara berkala.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus.	Pada implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk, setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan dengan konsensus. Tidak hanya sebagai penerapan musyawarah untuk mufakat namun juga sebagai titik temu dalam merumuskan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik.	Kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Kelurahan Talangbubuk memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: mendukung implementasi ProKlim sesuai peraturan

perundang-undangan dan pemerintah setempat.

Sumber: Analisis Peneliti, 2021.



Gambar 2 Contoh forum yang diprakarsai oleh lembaga publik



Gambar 2. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam forum Implementasi Replikasi ProKlim Menuju ProKlim Lestari.

Berdasarkan temuan yang dianalisis menggunakan 6 (enam) kriteria Collaborative Governance dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat

Kelurahan Talangbubuk pada implementasi ProKlim dapat dikategorikan sebagai proses kolaborasi.

3. Kesimpulan

Collaborative governance dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020 dikategorikan sebagai proses kolaborasi yang apik. Pada penelitian selanjutnya, pengembangan dapat dilakukan proses *collaborative governance* yang lebih detail.

Penghargaan: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju yang telah memfasilitasi untuk penelitian mengenai Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543-571. <http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Goliday, A. M. (2010). Identifying the Relationship Between Network Governance and Community Action Program Participation (Disertasi). Departement Public Policy and Administration, Walden University. Diakses tanggal 18 Mei 2021. dari UMI Dissertations Publishing.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8 (1), 21–46. DOI: 10.21580/at.v8i1.1163
- Patilima. (2005). Teknik Analisis Data. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subadi, T. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiarto, A., Hanifa, M., dan Sarno. (2018). Pemanasan Global di Sumatera Selatan dan Peningkatan Suhu Udara yang Terjadi; Pemodelan Pengaruhnya Terhadap Transpirasi *Lansium Domesticum Corr* (Paper). Indralaya: Jurusan

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Sriwijaya. DOI: 10.31227/osf.io/st4eh.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.